

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM
PENANGANAN BANJIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
(Suatu Studi Di Kabupaten Ende)**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

FRANSISKUS CHARLON LENA

NIM: 2020 110 825

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM
PENANGANAN BANJIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG**

(Suatu Studi Di Kabupaten Ende)

SKRIPSI

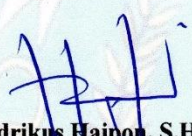
DI SUSUN OLEH:

FRANSISKUS CHARLON LENA
2020110825

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN: 0812117801


Sumirahayu Sulaiman, SH., M.Hum
NIDN: 0801028602

Mengetahui:

**Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**

**Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**


Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN: 0823036701


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN: 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM PENANGANAN BANJIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

(Suatu Studi Di Kabupaten Ende)

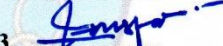
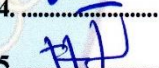
SKRIPSI

FRANSISKUS CHARLON LENA

NIM: 2020110825

Telah Di Uji Dan dipertanggungjawabkan
Didepan Dewan Penguji Skripsi
Pada Hari : Rabu
Tanggal 27 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc | (Ketua) | 1.  |
| 2. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 3.  |
| 4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 4.  |
| 5. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 5.  |

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum
Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN: 0823036701

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fransiskus Charlon Lena
Nim : 2020110825
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM PENANGANAN BANJIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG”**.

Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2025



Fransiskus Charlon Lena
Nim: 2020110825

MOTTO

“Hidup Ini Singkat, Buatlah Berarti”

(Fransiskus Charlon Lena)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas berkat, rahmat serta bimbinganya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sampai pada proses akhir dengan baik. Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua, Bapak Lukas Lena dan Mama Maria Matilde Londa yang sudah melahirkan dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas doa dan pengorbanannya serta semua cinta luar biasa yang telah Bapa dan Mama berikan kepada peneliti.
2. Yang tercinta Adik Leoandri Langi Lena Dan Adik Yogariano Laba Lena yang dengan caranya masing-masing telah memberikan Doa, dukungan baik moril maupun materil kepada peneliti. Terimah kasih atas pengorbanannya selama ini.
3. Almamater tercinta Universitas Flores Khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Ende Dalam Penanganan Banjir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”**, dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang di peroleh peneliti guna menambah wawasan peneliti, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengalami kesulitan, hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu Dosen, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula peneliti menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Laurentinus D. Gadi Djou, Akt, selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr.Wilybrodus Lanamana, M.M.A, selaku Rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan

Tinggi Universitas Flores.

3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
4. Bapak Agustinus Paskalino Dadi S.FIL.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum,Keuangan,dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M. Hum, selaku Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
11. Kepala Perpustakaan Universitas Flores dan para pegawai Perpustakaan Universitas Flores yang telah membantu peneliti dengan pemilihan buku-buku untuk data penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ende dan para pegawai di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ende yang telah membantu peneliti dengan memberikan informasi, selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
13. Lurah Mautapaga dan para pegawai di kantor Kelurahan Mautapaga yang telah membantu peneliti dengan memberikan informasi, selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores Angkatan 2020 yang mendoakan dan mendukung baik moril maupun materil bagi penulis.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, Agustus 2025

Peneliti

Fransiskus Charlon Lena

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM PENANGANAN BANJIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG (Suatu Studi Di Kabupaten Ende). Disusun Oleh: Fransiskus Charlon Lena, Nim: 2020110825.

Banjir yang kerap kali melanda di wilayah Kelurahan Mautapaga Kabupaten Ende, menjadi persoalan serius yang menuntut perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks penataan ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ende dalam mengatasi masalah banjir dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan metode penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Lurah Mautapaga, serta masyarakat terdampak banjir. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), implementasinya di lapangan belum berjalan optimal. Beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta lemahnya koordinasi antar instansi teknis. Di sisi lain, perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan kabupaten dalam menentukan lokasi prioritas pembangunan drainase turut memperparah persoalan. Untuk itu, dibutuhkan penguatan dalam hal perencanaan berbasis data, pelibatan masyarakat, serta penegakan hukum tata ruang agar upaya mitigasi banjir dapat dilakukan secara berkelanjutan dan efektif.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Penanganan Banjir, Penataan Ruang.

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF ENDE DISTRICT GOVERNMENT IN HANDLING BANJIR REVIEWED FROM UNDERGOING NUMBER 26 YEAR 2007 ABOUT SPACE PLANNING (Study in Ende Regency). Prepared by: Fransiskus Charlon Lena, Nim: 2020110825.

Flooding, which often occurs in the Mautapaga Village area of Ende Regency, is a serious problem that demands the attention and responsibility of the local government in the context of spatial planning. This research aims to examine the extent of the Ende Regency Government's responsibility in overcoming flooding problems by referring to the provisions of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, as well as identifying factors that hinder its implementation. The approach used is juridical sociological with empirical legal research methods. Primary data was obtained through direct interviews with the Public Works and Spatial Planning Agency, Mautapaga Village Head, and flood-affected communities. Meanwhile, secondary data was collected from various literature sources and laws and regulations. The results showed that although the local government has a Regional Spatial Plan document, its implementation in the field has not been optimal. Some of the main obstacles faced include budget constraints, lack of public awareness in maintaining environmental cleanliness, and weak coordination between technical agencies. On the other hand, differences in perceptions between village and district governments in determining priority locations for drainage development also exacerbate the problem. For this reason, strengthening data-based planning, community involvement, and spatial law enforcement are needed so that flood mitigation efforts can be carried out in a sustainable and effective manner.

Keywords: Government Responsibility, Flood Management, Spatial Planning

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK ..	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Peneliti.....	7
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Teknik Pengumpulan Data	10
1.7 Analisis Data... ..	11
1.8 Lokasi Penelitian.....	12
1.9 Sistematika Penulisan....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian Tanggung Jawab.....	13
2.2 Pengertian Banjir.....	14
2.3 Jenis- Jenis Banjir	15
2.4 Faktor -Faktor Penyebab Banjir	16
2.5 Penanggulangan Banjir	16
2.6 Tata Ruang	17
BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM MENGATASI MASALAH BANJIR SESUAI KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG	22
3.1 Pemerintah Daerah Wajib Menyusun Tata Ruang Wilayah	22
3.2 Pemerintah Daerah Wajib Membuat Pedoman Pelaksanaan Pembangunan	25
3.2.1 Fungsi Mitigasi/ Penanggulangan Bencana Banjir	31
3.2.2 Fungsi Mencegah Pembangunan di Kawasan Rawan Banjir.....	32
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM MENGATASI MASALAH BANJIR DI KABUPATEN ENDE.....	36
4.1 Faktor Pengawasan	36
4.2 Perilaku Masyarakat Tidak Mendukung Upaya Penanggulangan Banjir.....	38
4.3 Kondisi Geografis Dan Topografi Wilayah Yang Menambah Risiko	41
4.4 Keterbatasan Anggaran	44
4.5 Kendala Terbatasnya Lahan Dalam Perluasan Saluran Drainase	46
4.6 Pengerjaan Proyek Tidak Sesuai Dengan Usulan Kelurahan Dan	

Respons Pemerintah Kabupaten.....	48
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran-Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	